

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 2021



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkah dan kehendak-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 dapat diselesaikan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ciamis untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

Perubahan Renstra BPKD ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan di Kabupaten Ciamis sebagaimana diamanatkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis ini kami susun, semoga menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis.

Dalam hal penyusunannya, tentu saja baik secara materil maupun penyajian Renstra ini masih jauh dari sempurna, namun demikian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung serta memberikan kontribusi yang nyata terhadap terwujudnya Visi Kabupaten Ciamis.



Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Ciamis, 21 Maret 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



ASEP DEDI HERDIANA.,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650912 199301 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.3.1. Maksud	7
1.3.2. Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD	11
2.2. Sumber Daya BPKD	28
2.3. Kinerja Pelayanan BPKD	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKD.....	49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD.....	50
3.2. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Prov. Jawa Barat.....	54
3.4. Telaahan Terhadap RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kab. Ciamis	60
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	63
4.1. Tujuan dan Sasaran	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	84
BAB VIII PENUTUP.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	28
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis...	30
Tabel 2. 3 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
Tabel 2. 4 Data Sarana dan Prasarana	32
Tabel 2. 5 Opini BPK-RI atas LKPD Kabupten Ciamis	37
Tabel 2. 6 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016-2020	37
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	38
Tabel 2. 8 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan BPKD	39
Tabel 2. 9 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2016 - 2020	41
Tabel 2. 10 Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016-2020	41
Tabel 2. 11 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	42
Tabel 2. 12 Realisasi Terhadap Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis	43
Tabel 2. 13 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	43
Tabel 2. 14 Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2020.....	45
Tabel 2. 15 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis	47
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	51
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	67
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	70
Tabel 6. 1 Tabel Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah BPKD	73
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis.....	84
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
Gambar 2. 2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020	40
Gambar 2. 3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis TA. 2016-2020.....	40
Gambar 2. 4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	42
Gambar 2. 5 Rasio Realisasi Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis ...	43
Gambar 2. 6 Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2016 - 2020.....	44
Gambar 2. 7 Prosentase Capaian Pendapatan Daerah.....	45
Gambar 2. 8 Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah TA. 2016 - 2020.....	46
Gambar 2. 9 Target APBD TA. 2016 - 2020	47
Gambar 2. 10 Realiasi APBD TA. 2016 - 2020.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan arah pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 disusun dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 dan RPJPD tahun 2005-2024 . Selanjutnya Renstra dimaksud menjadi acuan dalam penentuan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis.

Perubahan mendasar yang memengaruhi substansi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional. berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain :



1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Kabupaten Ciamis diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; merupakan ketentuan implementatif yang mendukung penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan juga sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan



/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024 juga memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam penentuan indikator kinerja dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan pada masing- masing tingkat pemerintahan. Hal tersebut penting dilakukan dalam upaya mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam Perubahan Renstra BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Selanjutnya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP), rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai satu-satunya organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati Ciamis selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan



yang mewakili Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Berdasarkan wewenang dan amanat yang diemban, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertekad untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang transparan dan akuntabel yang berbasis aktual dan bertekad untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka memperkuat otonomi daerah. Dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah juga perlu dilakukan perubahan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempergunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 sebagai acuannya. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diemban, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ikut berperan mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu “MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA” dengan misi 5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Ciamis diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis . Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;



21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Keududukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2022, 2023, dan 2024 serta dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan, untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran lima tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, diterjemahkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:



1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah urusan bidang penelitian dan pengembangan. Sesuai pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.
2. Menjadi acuan kinerja resmi bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan bidang Keuangan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis.
4. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
5. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.
6. Penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome).

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RENSTRA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 *Latar Belakang*, Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENSTRA, proses penyusunan RENSTRA, keterkaitan antara dokumen RENSTRA dengan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.



- 1.2 *Landasan Hukum*, Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RENSTRA, baik yang berskala nasional, maupun lokal
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RENSTRA bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RENSTRA bagi daerah yang bersangkutan.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RENSTRA terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKD KABUPATEN CIAMIS, menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah kedepannya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, memuat identifikasi tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaah mengenai visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra, Telaah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis lainnya. memuat tentang isu-isu strategis dalam pelaksanaan kinerja pelayanan BPKD. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD Kabupaten Ciamis.

- 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.2 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga dan BPKAD Provinsi Jawa Barat.
- 3.3 Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Ciamis.
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPKD, membahas mengenai rumusan pernyataan pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BPKD Kabupaten Ciamis.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, mengemukakan mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah kedepannya dalam lima tahun



mendatang. memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan BPKD Kabupaten Ciamis.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat mengenai rencana program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan indikatif. memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan BPKD Kabupaten Ciamis selama 5 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat berupa indicator kinerja perangkat daerah, yang secara langsung menunjukkan berupa hasil kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD. memuat tentang indikator kinerja BPKD Kabupaten Ciamis yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP, berisi kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RENSTRA. memuat tentang ringkasan Perubahan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Perubahan Renstra BPKD Tahun 2019-2024.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

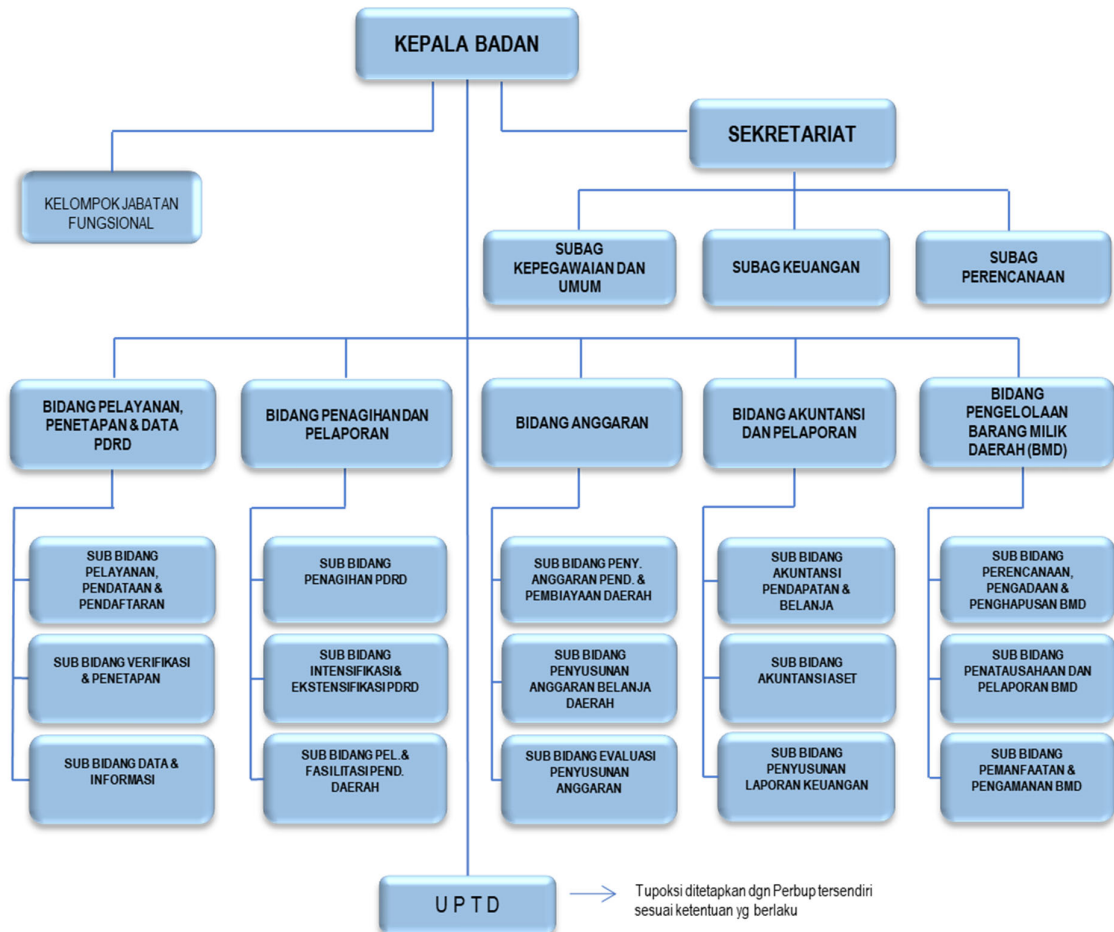
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis



Sumber : Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. emantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Badan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja badan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;



- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Perencanaan

(1) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
- b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;



- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPT;
- f. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- g. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- h. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pengelolaan perlengkapan Badan;
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;



- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pelayanan, Penetapan Dan Data PDRD

Bidang Pelayanan, Penetapan dan Data PDRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan, penetapan dan data PDRD;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan, penetapan dan data PDRD;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pelayanan, penetapan dan data PDRD;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan, penetapan dan data PDRD;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Pendaftaran

Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Pendaftaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pembuatan daftar induk wajib pajak;
- c. penerbitan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan pelayanan PDRD;
- e. pengolahan formulir pendaftaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/Surat Pemberitahuan Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak (SPTPD/SPOP PBB);



- f. pengolahan data kelengkapan permohonan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);
- g. pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan

Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penerbitan pemberitahuan pajak terutang dan penetapan besaran pajak.
- b. pelaksanaan verifikasi dan validiasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- c. pelaksanaan legalisasi terhadap benda-benda berharga dan pengesahan lainnya.
- d. pelaksanaan penelitian berkas permohonan mutasi, pembetulan dan pembatalan ketetapan PDRD
- e. pelaksanaan penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);
- f. pelaksanaan penetapan SKPDKB/SKRDKB, SKPDKBT/SKRDKBT, SKPDLB/SKRDLB, SKPDN/SKRDN, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P-2);
- g. pelaksanaan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan SKPD dan SKRD;



- h. pelaksanaan penelitian lapangan untuk pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- i. pelaksanaan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
- j. pelaksanaan verifikasi dan pendistribusian kelengkapan dan validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB);
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perekaman, pengolahan data dan analisis data PDRD;
- b. pengamanan dan pemanfaatan database PDRD;
- c. penyimpanan arsip dan berkas PDRD;
- d. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PDRD;
- e. penerbitan SKPD, SPPT PBB P-2, SKRD Pengelolaan Kekayaan Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB;
- f. pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak;
- g. pelaksanaan pengolahan data perolehan objek pajak BPHTB;
- h. pelaksanaan pendataan dan mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;
- i. pelaksanaan Pendataan hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta PBB P-2;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penagihan dan Pelaporan

Bidang Penagihan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :



- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penagihan dan pelaporan PDRD;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang penagihan PDRD;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penagihan dan pelaporan PDRD;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bidang Penagihan PDRD

Sub Bidang Penagihan PDRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyampaian SKPD, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), SKRD Pengelolaan Kekayaan Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB;
- b. pelaksanaan penagihan dan penatausahaan penerimaan PDRD;
- c. pelaksanaan penatausahaan piutang PDRD dan pembuatan usulan penghapusan piutang PDRD;
- d. pelaksanaan pendistribusian SPPT PBB P-2 kepada wajib pajak;
- e. fasilitasi surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
- f. pelaksanaan penagihan PDRD dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- g. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- h. memproses pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- i. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- j. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- k. penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian banding dan pengurangan sanksi PDRD;



- l. pelaksanaan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PDRD

Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PDRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian terkait PDRD;
- b. pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek PDRD;
- c. pelaksanaan pembinaan, edukasi dan sosialisasi terkait PDRD;
- d. penetapan dan penerbitan produk hukum PDRD;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Pelaporan dan Fasilitasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pelaporan dan Fasilitasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebijakan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan monitoring, rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan daerah;
- d. penyusunan bagi hasil PDRD;
- e. pelaksanaan proses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan APBD;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
- c. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi penyusunan APBD;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan teknis anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. pengoordinasian sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dana transfer;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Daerah

Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan anggaran belanja daerah;
- b. pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan teknis anggaran belanja tidak langsung;



- c. pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan teknis anggaran belanja langsung;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Evaluasi Penyusunan Anggaran

Sub Bidang Evaluasi Penyusunan Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rancangan regulasi kebijakan penyusunan APBD seperti standar biaya, analisis standar belanja dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPD/PPKD);
- b. pelaksanaan evaluasi penyusunan RKA-SKPD/PPKD;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penyajian informasi keuangan daerah;
- c. perencanaan dan penyusunan sistem, dan prosedur akuntansi keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. perencanaan dan pengembangan kinerja pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
- e. perencanaan dan pengembangan kinerja pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah;



- f. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- g. penyusunan laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyajian informasi keuangan daerah;
- i. pelaksanaan akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- j. penyiapan bahan-bahan penyajian informasi keuangan daerah;
- k. pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan aset/barang milik daerah yang meliputi kas daerah, piutang daerah, investasi daerah, barang-barang milik daerah meliputi aset tetap, aset lain-lain dan utang daerah;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program di bidang akuntansi dan pelaporan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja

Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan akuntansi dan sistem prosedur akuntansi pendapatan daerah, transfer daerah, akuntansi belanja serta akuntansi pembiayaan daerah;
- b. perencanaan program kegiatan pelaksanaan sistem informasi akuntansi keuangan pendapatan daerah, transfer daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara sistematis;
- c. perencanaan program kegiatan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi pendapatan daerah, transfer daerah, belanja dan pembiayaan daerah;



- d. perencanaan program kegiatan pengolahan data dan sistem informasi akuntansi keuangan pendapatan daerah, transfer daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara sistematis; sebagai bahan penyajian sistem informasi keuangan pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan sistem informasi akuntansi pendapatan daerah, transfer daerah dan belanja serta pembiayaan secara sistematis dan kronologis terhadap realisasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD/SKPKD);
- f. pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah keuangan dengan SKPD/SKPKD sebagai bahan untuk penyajian sistem informasi keuangan pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan asistensi dalam rangka implementasi sistem akuntansi keuangan dengan SKPD/SKPKD sebagai bahan untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Akuntansi Aset

Sub Bidang Akuntansi Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan akuntansi dan sistem prosedur akuntansi aset lancar, akuntansi investasi, akuntansi dana cadangan dan akuntansi aset lainnya;
- b. perencanaan program kegiatan pelaksanaan penatausahaan akuntansi kas daerah, piutang daerah, investasi daerah, utang daerah, barang-barang milik daerah meliputi persediaan aset tetap, aset lain-lain dan penatausahaan pembiayaan daerah secara sistematis;
- c. perencanaan program kegiatan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur penatausahaan akuntansi kas daerah, piutang daerah, investasi daerah, utang daerah, barang-barang milik daerah meliputi



- persediaan, aset tetap dan aset lain-lain, dan penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. perencanaan program kegiatan pengolahan data dan evaluasi penatausahaan akuntansi kas daerah, piutang daerah, investasi daerah, utang daerah, barang-barang milik daerah meliputi persediaan, aset tetap dan aset lain-lain, dan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan

Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan akuntansi dan sistem prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah;
- b. perencanaan program kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD/SKPD sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. perencanaan program kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. perencanaan program kegiatan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah;
- e. perencanaan program kegiatan penyusunan kebijakan dan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah;
- f. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD/SKPKD sebagai bahan penyusunan laporan keuangan SKPD/SKPKD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah;



- g. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan SKPD/SKPKD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan analisa atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dikonsolidasikan sebagai bahan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- i. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah untuk bahan pemeriksaan audit eksternal dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan-bahan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah secara sistematis;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan pengelolaan investasi dan aset/barang milik daerah;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan, penggunaan dan pemanfaatan aset/barang milik daerah;
- c. perumusan bahan kebijakan penetapan standar harga barang/jasa;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan aset/barang milik daerah;
- e. pelaksanaan analisa kebutuhan barang dan perlengkapan;
- f. pengadaan/penyediaan dan pendistribusian barang, perlengkapan dan perbekalan serta benda berharga;
- g. penyelenggaraan administrasi, pengendalian, pemeliharaan, penggunaan, dan pemanfaatan aset/barang milik daerah;
- h. pengelolaan investasi, inventarisasi, pendataan dan penatausahaan pemeliharaan, penggunaan serta pemanfaatan aset/barang milik daerah;



- i. pengelolaan administrasi pembukuan, penerimaan dan persediaan benda berharga serta pengelolaan legalisasi benda-benda berharga;
- j. pelaksanaan sistem dan prosedur pelaporan realisasi penerimaan dan persediaan benda-benda berharga;
- k. fasilitasi pengelolaan aset/barang milik daerah pemekaran;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- b. pengadaan barang milik daerah;
- c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran aset/barang milik daerah;
- d. pemindahtanganan aset/barang milik daerah;
- e. penghapusan aset/barang milik daerah;
- f. penyusunan standar harga tertinggi;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan dan inventarisasi aset/barang milik daerah;
- b. penilaian aset/barang milik daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian aset/barang milik daerah;



- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengamanan aset/barang milik daerah;
- b. penggunaan aset/barang milik daerah;
- c. perawatan dan pemeliharaan aset/barang milik daerah;
- d. penertiban penggunaan dan pemanfaatan aset/barang milik daerah;
- b. memproses Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi (TP/TGR);
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - b. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pembentukan, nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016.

2.2. Sumber Daya BPKD

Adapun komposisi pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan per Agustus 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	URAIAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS				
1	Kepala BPKD	1	-	1
2	Sekretariat	11	12	23



No	URAIAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
3	Bidang Penagihan dan Pelaporan	8	4	12
4	Bidang Pelayanan, Penetapan, dan Data PDRD	7	6	13
5	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2	5	7
6	Bidang Anggaran	8	5	13
7	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	3	11
8	UPTB Ciamis	6	-	6
9	UPTB Panjalu	2	-	2
10	UPTB Kawali	2	-	2
11	UPTB Banjarsari	3	1	4
12	UPTB Cihaurbeuti	3	-	3
13	UPTB Rancah	2	-	2
JUMLAH PNS		63	36	99
NON PNS				
1	Jasa Kebersihan	13	-	13
2	Administrasi	27	12	39
3	Keamanan	9	-	9
4	Supir	5	-	5
JUMLAH NON PNS		54	12	66

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah PNS BPKD per Agustus 2021 adalah sebanyak 99 orang. Komposisi pegawai BPKD Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 63 orang laki-laki atau 63,64 % dan perempuan sebanyak 36 orang atau 36,36 %.

Sementara untuk jumlah Pegawai Non PNS BPKD per Agustus 2021 adalah sebanyak 66 orang, dengan jumlah Laki-Laki sebanyak 54 orang atau 81,81% dan jumlah Perempuan sebanyak 12 orang atau 18,19%.



Tabel 2. 2 Rekapitulasi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

NO	URAIAN	JUMLAH PNS	GOLONGAN																				
			IV					III					II					I					
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	Kepala	1			1			1					0					0					0
2	Sekretariat	23	1	1			2	5	8	2	3	18		1	1	2	4					0	
3	Bidang Penagihan dan Pelaporan	12					0	1	4	1	4	10			1	2	3					0	
4	Bidang Pelayanan, Penetapan, dan Data PDRD	13					0	2	1	4	3	10			2	1	3					0	
5	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	7	2				2	1		2	2	5					0					0	
6	Bidang Anggaran	13	1				1	3	2	1	2	8				1	1					0	
7	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	1				1	3	1	4	2	10			1		1					0	
8	UPTB Ciamis	6					0		1		1	2			2	1	3				1	1	
9	UPTB Panjalu	2					0				2	2					0					0	
10	UPTB Kawali	2					0		1		1	2					0					0	
11	UPTB Banjarsari	4								1	1	2		1		1	2					0	
12	UPTB Cihaurbeuti	3							2		1	3					0					0	
13	UPTB Rancah	2									2	2					0					0	
Jumlah Per Golongan		99	5	1	1	0	0	7	15	20	15	24	74	0	2	7	8	17	0	0	0	1	1

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021

Dari tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai BPKD Kabupaten Ciamis per Agustus 2021 berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 74 orang atau 74,75%. kemudian disusul oleh golongan II sebanyak 17 orang atau 17,17%, dan golongan IV sebanyak 7 orang atau 7,07%.



Tabel 2. 3 Data Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
PNS		1	15	52	0	2	28	0	1	99
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	2	12	-	-	10	-	-	24
3	Bidang Penagihan dan Pelaporan	-	3	5	-	-	5	-	-	13
4	Bidang Pelayanan, Penetapan, dan Data PDRD	-	2	7	-	1	3	-	-	13
5	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	2	5	-	-	-	-	-	7
6	Bidang Anggaran	-	4	4	-	-	2	-	-	10
7	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	2	8	-	-	2	-	-	12
8	UPTB Ciamis	-	-	2	-	-	3	-	1	6
9	UPTB Panjalu	-	-	2	-	-	-	-	-	2
10	UPTB Kawali	-	-	1	-	1	-	-	-	2
11	UPTB Banjarsari	-	-	2	-	-	2	-	-	4
12	UPTB Cihaurbeuti	-	-	2	-	-	1	-	-	3
13	UPTB Rancah	-	-	2	-	-	-	-	-	2
NON PNS		0	0	38	0	0	28	0	0	66
1	Jasa Kebersihan	-	-	2	-	-	12	-	-	14
2	Administrasi	-	-	22	-	-	6	-	-	28
3	Keamanan	-	-	13	-	-	8	-	-	21
4	Supir	-	-	1	-	-	2	-	-	3

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021

Dari tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai BPKD Kabupaten Ciamis per Agustus 2021 berdasarkan Pendidikan S1 dengan 52 orang atau 52,52%, Pendidikan SLTA sebanyak 28 orang atau 28,28%, Pendidikan S2 sebanyak 15 atau 15,15%. Sementara untuk Non PNS BPKD didominasi Pendidikan S1 sebanyak 38 orang 57,57% dan Pendidikan SLTA sebanyak 28 orang atau 42,43%.



2.3 Sarana dan Prasarana BPKD

Berikut data sarana dan prasara yang dikuasai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis :

Tabel 2. 4 Data Sarana dan Prasarana

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	4769 m2			
2	Gedung Kantor	8003 m2			
3	Gedung Aula (belakang Pol PP)	01 Unit			
4	Bangunan UPTB Cihaurbeuti	484 m2			
5	Kendaraan Roda 4 (Empat)	08 unit	08 unit	0 unit	0 unit
6	Kendaraan Roda 2 (Dua)	24 unit	24 unit	0 unit	0 unit
7	Mesin Pompa air PMK	11 unit	11 unit	0 buah	0 buah
8	Scanner (Universal Tester)	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
9	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
10	Rak-Rak Penyimpan	44 buah	44 buah	0 buah	0 buah
11	Lemari Penyimpan	13 buah	13 buah	0 buah	0 buah
12	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
13	Mesin Penghitung Uang	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
14	Lemari Besi/Metal	44 buah	44 buah	0 buah	0 buah
15	Lemari Kayu	36 buah	36 buah	0 buah	0 buah
16	Rak Besi + Rak Kayu	122 buah	122 buah	0 buah	0 buah
17	Filing Cabinet Besi	42 buah	42 buah	0 buah	0 buah
18	Brandkas	4 buah	4 buah	0 buah	0 buah
19	Lemari Kaca	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
20	CCTV - Camera Control Television System	23 unit	23 unit	0 buah	0 buah
21	Papan Visual/Papan Nama	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
22	Alat Penghancur Kertas	22 buah	22 buah	0 buah	0 buah
23	Mesin Absensi	7 buah	7 buah	0 buah	0 buah
24	Alat Pemotong Kertas	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
25	White Board Electronic	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
26	Mesin Laminating	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
27	Genset	8 buah	8 buah	0 buah	0 buah
28	Meja Kerja Kayu	107 buah	107 buah	0 buah	0 buah
29	Kursi Kayu	10 buah	10 buah	0 buah	0 buah
30	Sice	9 buah	9 buah	0 buah	0 buah



NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
31	Meja Rapat	9 buah	9 buah	0 buah	0 buah
32	Meja Resepsionis	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
33	Meja Panjang	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
34	Meja 1/2 Biro	5 buah	5 buah	0 buah	0 buah
35	Kursi Rapat	437 buah	437 buah	0 buah	0 buah
36	Kursi Tamu	42 buah	42 buah	0 buah	0 buah
37	Kursi Putar	27 buah	27 buah	0 buah	0 buah
38	Kursi Biasa	13 buah	13 buah	0 buah	0 buah
39	Kursi Lipat	152 buah	152 buah	0 buah	0 buah
40	Sofa	21 buah	21 buah	0 buah	0 buah
41	Meja Biro	4 buah	4 buah	0 buah	0 buah
42	Kursi Teras	8 buah	8 buah	0 buah	0 buah
43	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
44	Mesin Pemetong Rumput	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
45	Lemari Es	9 buah	9 buah	0 buah	0 buah
46	A.C. Split	49 buah	49 buah	0 buah	0 buah
47	Kipas Angin + Exhaust Fan	87 buah	87 buah	0 buah	0 buah
48	Kompas Gas (Alat Dapur)	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
49	Loudspeaker	12 buah	12 buah	0 buah	0 buah
50	Wireless	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
51	Microphone	14 buah	14 buah	0 buah	0 buah
52	Unit Power Supply	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
53	Camera film	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
54	Handy Cam	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
55	Alat Pemadam/Portable	9	9	0 buah	0 buah
56	Tombol Kebakaran/Alarm	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
57	Hidran Kebakaran	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
58	Meja Kerja Pejabat Eselon	25 buah	25 buah	0 buah	0 buah
59	Meja Tamu Biasa	6 buah	6 buah	0 buah	0 buah
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon	20 buah	20 buah	0 buah	0 buah
61	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	152 buah	152 buah	0 buah	0 buah
62	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	40 buah	40 buah	0 buah	0 buah
63	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	38 buah	38 buah	0 buah	0 buah
64	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	51 buah	51 buah	0 buah	0 buah
65	Audio Amplifier	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
66	Audio Distribution	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
67	Microphone/Wireless MIC	6 buah	6 buah	0 buah	0 buah



NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK
68	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
69	Power Amplifier	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
70	Camera + Attachment	10 buah	10 buah	0 buah	0 buah
71	Proyektor + Attachment	10 buah	10 buah	0 buah	0 buah
72	Camera Electronic	5 buah	5 buah	0 buah	0 buah
73	Tripod Camera	5 buah	5 buah	0 buah	0 buah
74	Lensa Kamera	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
75	Layar Film/Projector	5 set	5 set	0 buah	0 buah
76	Character Effect Interface	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
77	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
78	Telephone (PABX)	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
79	Handy Talky (HT)	8 set	8 set	0 buah	0 buah
80	Facsimile	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
81	Unit Tranceiver Ssb Portable	5 buah	5 buah	0 buah	0 buah
82	Wireless Amplifier	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
83	Unit Pemancar HF/SW Transportable	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
84	Unit Pemancar SHF Transportable	43 buah	43 buah	0 buah	0 buah
85	Antene UHF Transportable	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
86	Switcher Antena Lain-Lain	43 buah	43 buah	0 buah	0 buah
87	Self Supporting Tower	4 buah	4 buah	0 buah	0 buah
88	Mast Tower	11 buah	11 buah	0 buah	0 buah
88	Switcher/Menara Antena Lain-Lain	43 unit	43 unit	0 buah	0 buah
89	Compressor Amplifier	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
90	Leather Case For Metal Container	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
91	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
92	Tools	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
93	Screen	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
94	Exhaust Fan	13 buah	13 buah	0 buah	0 buah
95	Alat Crimp Tester	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
96	Meja Kerja	21 buah	21 buah	0 buah	0 buah
97	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	8 buah	8 buah	0 buah	0 buah
98	Fire Extinguisher	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
99	Smoke Detecting System & Alarm	8 buah	8 buah	0 buah	0 buah
100	Glove Box (Radiation Detector)	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
101	Modular Counting And Scientific Electronic Lain-Lain	5 buah	5 buah	0 buah	0 buah

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021



2.4 Kinerja Pelayanan BPKD

Sesuai dengan dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode 2016 - 2020 dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 mengamanatkan bahwa “pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Target pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan di dalam APBD telah menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena penetapannya dilakukan melalui tahapan pendataan, perhitungan, penerbitan Surat-surat Ketetapan tentang pendapatan daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan target pendapatan dari dana perimbangan ditetapkan setelah dikonsultasikan dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Pusat dan atau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Laporan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggungan Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ciamis bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material.



Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemeriksa yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut Opini BPK, Laporan Keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SP1 dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan undang-undang. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan Nomor 17B/LHP/XVIII.BDG/OS/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Tabel 2. 5 Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten Ciamis

Uraian	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 2. 6 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016-2020

URAIAN	Target Tahun Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.512.478.052.246	2.598.280.261.738	2.591.897.874.505	2.992.362.402.748	2.661.651.382.865
1. PAD	196.976.947.607	214.380.145.047	235.882.389.545	243.051.180.575	240.807.023.137
- PAJAK DAERAH	49.327.762.894	53.566.525.000	62.668.033.000	65.279.624.000	64.200.273.700
- RETRIBUSI DAERAH	16.403.536.800	19.670.746.421	8.386.551.000	8.804.611.000	8.011.228.000
- HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	3.501.742.766	3.317.036.000	3.980.800.000	3.700.000.000	3.700.000.000
- LAIN-LAIN PENDAPATAN	127.743.905.147	137.825.837.626	160.847.005.545	165.266.945.575	164.895.521.437
2. DANA PERIMBANGAN	1.438.800.426.000	1.725.783.248.000	1.644.028.716.412	1.840.365.523.643	1.653.635.275.017,00
- DANA BAGI HASIL PAJAK	45.000.855.000	50.063.984.000	49.947.441.000	44.395.499.561	52.535.891.875
-DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK	21.423.93.000	18.726.098.000	20.463.805.000	32.748.315.391	41.568.245.142,00
-DANA ALOKASI UMUM	1.203.476.252.000	1.182.335.044.000	1.156.616.512.412	1.212.593.846.191	1.124.523.808.000
- DANA ALOKASI KHUSUS	168.899.384.000	474.658.122.000	417.000.958.000	550.627.862.500	97.683.002.000
3. LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	876.700.678.639	658.116.868.691	711.986.768.548	908.945.698.530	124.563.278.051
- PENDAPATAN HIBAH	9.120.171.979	111.307.202.000	111.483.131.329	117.430.407.716	124.563.278.051
- DANA PENYESUAIAN	544.456.779.000	268.119.058.000	243.035.506.000	275.231.874.000	32.046.038.000
- BAGI HASIL PAJAK	107.129.910.985	112.775.561.491	114.105.383.019	126.077.106.214	-
- BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	215.993.816.675	165.915.047.200	243.362.748.200	390.206.310.600	208.384.274.234



Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 206-2020					
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pelaporan Keuangan Daerah.	1. Opini BPK-RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Tepat Waktu Penyampaian Raperda APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
		3. Kontribusi Belanja Langsung	30%	30%	30%	30%	32%	30%	32%	32%	40,28%	38,90%	
		4. APBD Sehat (Defisit Pendapatan terhadap Belanja	<3%	<3%	<3%	<4,5%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<4,5%	-1,75%
		5. Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Presentase Pertumbuhan PAD	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,24%
		2. Realisasi PAD Terhadap Target APBD	100%	100%	100%	100%	100%	104,80%	111,15%	116,5%	108,31%	103,08	
3	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Penatausahaan Aset Yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : Data Diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020, terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPKD. Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa sebagian besar indikator-indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 telah mencapai targetnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sebesar 101,94% (SANGAT BAIK) yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

$$100\%+100\%+113,83\%+100\%+100\%+92,96\%+108,76\%+100\%+/8 = 101,94 \% \text{ (SANGAT BAIK)}$$



Tabel 2. 8 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan BPKD

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
Progam/ Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	204.759.434.820	53.766.525.000	62.668.033.000	65.279.624.000	75.036.675.169	54.675.860.771	61.935.681.382	66.644.254.055	70.481.801.268	82.581.640.154	88,06	115,19	106,34	107,97	110,06	-38%	-35%
Pendapatan pajak Daerah	54.483.343.101	53.566.525.000	62.688.033.000	65.279.624.000	64.200.273.700	54.483.343.101	61.723.256.810	66.586.812.043	70.481.801.268	64.966.701.051	83,27	115,23	106,25	107,97	101,19	18%	42%
Pendapatan Retribusi Daerah	15.770.601.671	200.000.000	-	-	-	192.517.670	212.424.572	57.442.012	-	-	84,03	106,21	-	-	-	-99%	-171%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.501.875.937	-	-	-	3.700.000.000	-	-	-	-	3.676.875.983	90,09	-	-	-	99,38	0%	0%
Lain-lain Pendapatan Ali Daerah yang sah	131.003.614.111	-	-	-	7.136.401.469	-	-	-	-	13.938.090.120	90,48	-	-	-	195,31	0%	0%
Belanja	62.308.204.728	46.299.835.724	43.672.148.178	51.931.328.200	42.453.505.525	59.760.267.013	44.025.103.257	40.322.454.035	45.114.900.494	39.090.518.768	95,91	95,09	92,33	86,87	92,08	-31%	-36%
Belanja Operasi	33.637.092.128	38.293.811.724	39.208.823.178	42.888.799.100	36.982.445.675	54.472.380.263	36.406.647.657	35.939.306.069	39.395.935.502	34.500.067.837	161,94	60,74	91,66	91,86	93,29	12%	-37%
Belanja Pegawai	10.742.905.000	13.250.052.074	16.927.682.428	18.934.881.800	17.114.659.175	33.047.526.724	12.855.28.354	16.602.778.620	17.378.970.138	16.381.699.616	307,62	96,75	98,08	91,78	95,72	63%	-1%
Belanja Barang dan Jasa	11.624.485.200	25.043.759.650	22.281.140.750	23.953.917.300	19.867.786.500	21.424.853.539	23.551.619.303	19.359.097.449	22.016.965.364	18.118.368.221	184,31	94,04	86,89	91,91	91,19	95%	-12%
Belanja Modal	6.303.722.400	8.006.024.000	4.463.325.000	10.468.000.000	5.206.625.000	5.287.886.750	7.618.455.600	4.360.577.966	317.440.700	1.145.307.784	83,89	96,39	97,70	3,03	22,00	67%	169%

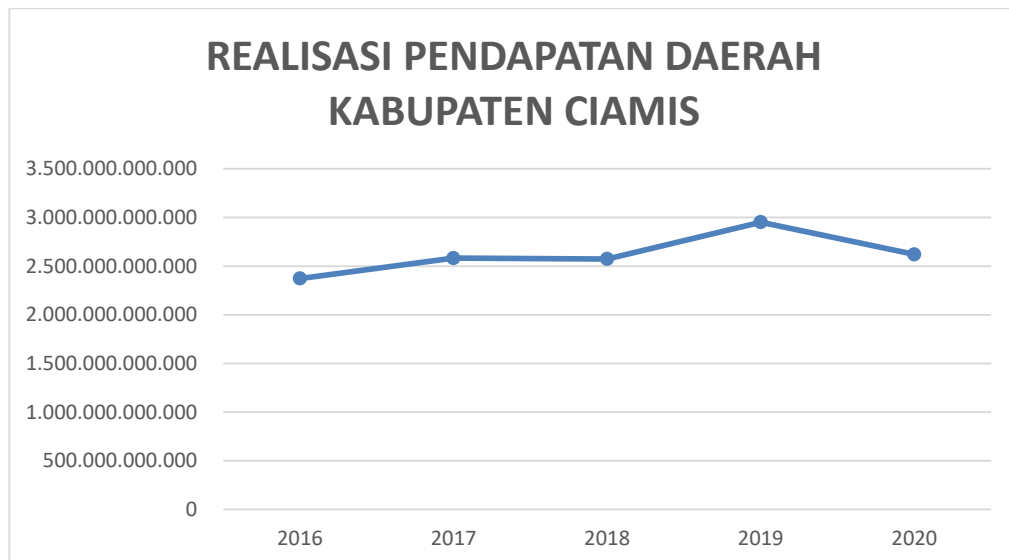
Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dari Tahun 2016-2020 secara umum terjadi peningkatan dengan rata-rata sebesar 1%, pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 13%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016-2020



Tabel 2. 9 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.372.854.213.035	2.582.166.044.869,56	2.573.447.559.792,00	2.951.167.251.682,52	2.620.232.709.430,16
1	PAD	204.759.434.820	223.076.019.908,56	234.446.808.098,00	264.280.368.263,52	254.192.324.020,16
	- PAJAK DAERAH	54.483.343.101	61.723.256.810,00	66.586.825.750,00	70.481.801.268,00	64.966.701.051,00
	- RETRIBUSI DAERAH	15.770.601.671	17.336.050.741,56	8.307.077.599,00	10.417.537.847,88	8.110.809.967,00
	- HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAER	3.501.875.937	3.672.522.161,00	3.983.637.549,00	3.444.500.119,00	3.676.875.983,00
	- LAIN-LAIN PENDAPATAN	131.003.614.111	140.344.190.196,00	155.569.267.200,00	179.936.529.028,64	177.437.937.019,16
2	DANA PERIMBANGAN	1.413.397.717.898	1.714.552.477.580,00	1.627.548.414.865,00	1.793.455.239.304,00	177.437.937.019,16
	- DANA BAGI HASIL PAJAK	53.757.014.103	47.118.173.010,00	40.362.675.200,00	30.851.002.240,00	48.009.720.582,00
	- DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK	20.088.440.795	26.899.242.252,00	24.333.314.822,00	24.325.666.380,00	38.094.200.052,00
	- DANA ALOKASI UMUM	1.203.476.252.000	1.182.335.044.000,00	1.156.616.512.412,00	1.212.593.846.191,00	1.112.349.718.000,00
	- DANA ALOKASI KHUSUS	136.076.011.000	458.200.018.318,00	406.235.912.431,00	525.684.724.493,00	430.646.331.128,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	754.697.060.317	644.537.547.381,00	711.452.336.829,00	893.431.644.115,00	736.940.415.648,00
	- PENDAPATAN HIBAH	9.120.171.979	113.358.080.000,00	111.990.960.000,00	116.532.800.000,00	124.567.805.014,00
	- DANA PENYUSUAIAN	430.361.065.400	268.119.058.000,00	243.035.506.000,00	274.928.462.800,00	292.286.586.000,00
	- BAGI HASIL PAJAK	102.881.726.955	110.568.504.539,00	116.228.963.438,00	124.171.550.133,00	115.879.317.000,00
	- BAGI HASIL LAINNYA	-	-152.491.904.842,00	-240.196.907.391,00		
	- BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	212.334.095.983	152.491.904.842,00	240.196.907.391,00	377.798.831.182,00	204.206.707.634,00

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Tabel 2. 10 Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016-2020

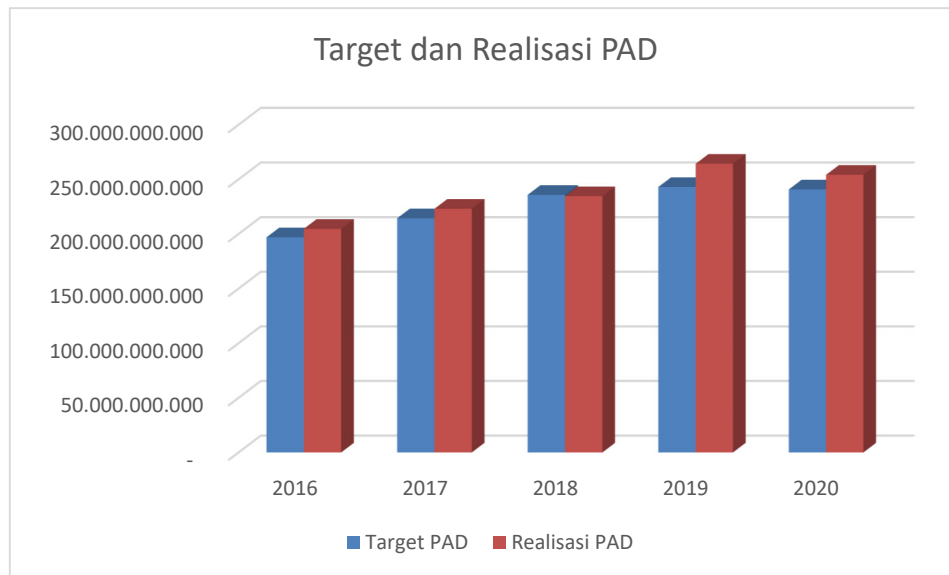
NO	URAIAN	%Realisasi Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		94,44	99,38	99,29	98,62	98,44
1	PAD	103,95	104,06	99,39	108,73	105,56
	- PAJAK DAERAH	110,45	115,23	106,25	107,97	101,19
	- RETRIBUSI DAERAH	96,14	88,13	99,05	118,32	101,24
	- HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAER	100	110,72	100,07	93,09	99,38
	- LAIN-LAIN PENDAPATAN	102,55	101,83	96,72	108,88	107,61
2	DANA PERIMBANGAN	98,23	99,35	99	97,45	98,52



NO	URAIAN		%Realisasi Tahun Anggaran				
			2016	2017	2018	2019	2020
	-	DANA BAGI HASIL PAJAK	119,46	94,12	80,81	69,49	91,38
	-	DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK	93,77	143,65	118,91	74,28	91,64
	-	DANA ALOKASI UMUM	100	100	100	100,00	98,92
	-	DANA ALOKASI KHUSUS	80,57	96,53	97,42	95,47	99,00
3		LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	86,08	97,94	99,92	98,29	107,61
	-	PENDAPATAN HIBAH	100	101,84	100,46	99,24	100,00
	-	DANA PENYUSUAIAN	79,04	100	100	99,89	100,00
	-	BAGI HASIL PAJAK	96,03	98,04	101,86	98,49	81,62
	-	BAGI HASIL LAINNYA					
	-	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	98,31	91,91	98,7	96,82	98,00

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Tabel 2. 11 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

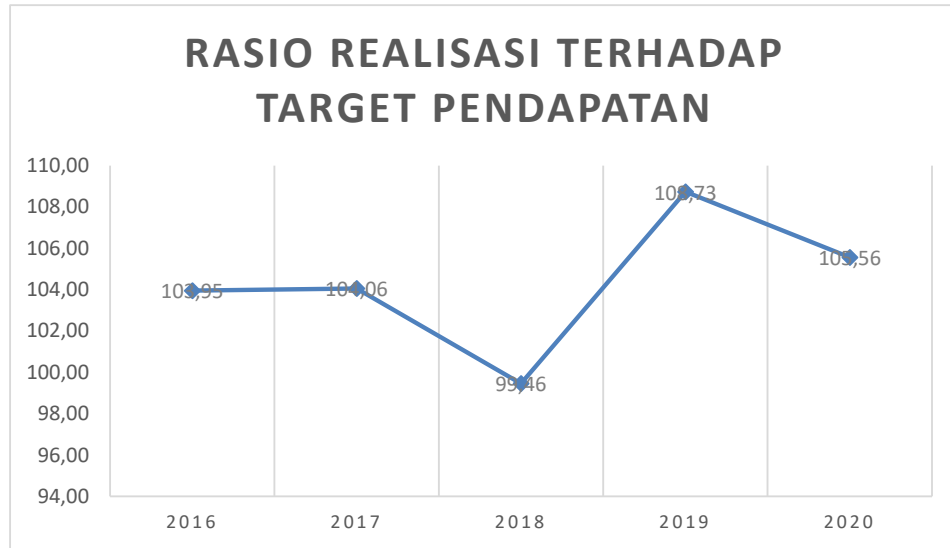


Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Tabel 2. 12 Realisasi Terhadap Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 5 Rasio Realisasi Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis

Rasio realisasi terhadap target pendapatan terjadi penurunan pada tahun ketiga yang disebabkan tidak tercapainya target PAD, Dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, namun pada tahun ke empat ada kenaikan dari lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan di tahun kelima terjadi penurunan pada Lain-lain Pendapatan yang disebabkan adanya perubahan target. Secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,98% dengan kontribusi tertinggi dari Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan dari Pendapatan Asli Daerah. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut :

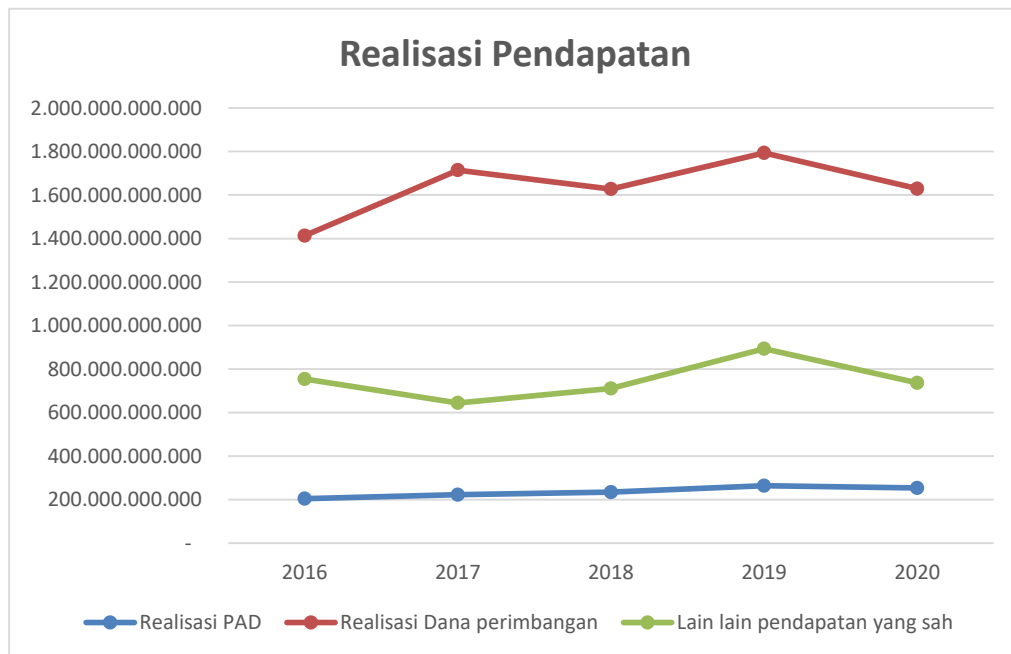
Tabel 2. 13 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Tahun	Milyar Rupiah								
	PAD			Dana Perimbangan			Lain-Lain Pendapatan		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2016	196,98	204,76	103,95	1.438,80	1.413,40	98,23	876,70	754,70	86,08
2017	214,38	223,08	104,06	1.725,78	1.714,55	99,35	658,12	644,54	97,94



Tahun	PAD			Dana Perimbangan			Lain-Lain Pendapatan		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2018	235,88	234,61	99,46	1.644,03	1.627,55	99,00	711,99	711,45	99,92
2019	243,05	264,28	108,73	1.840,37	1.793,46	97,45	908,95	893,43	98,29
2020	240,81	254,19	105,56	1.653,64	1.629,10	98,52	767,21	736,94	96,05

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

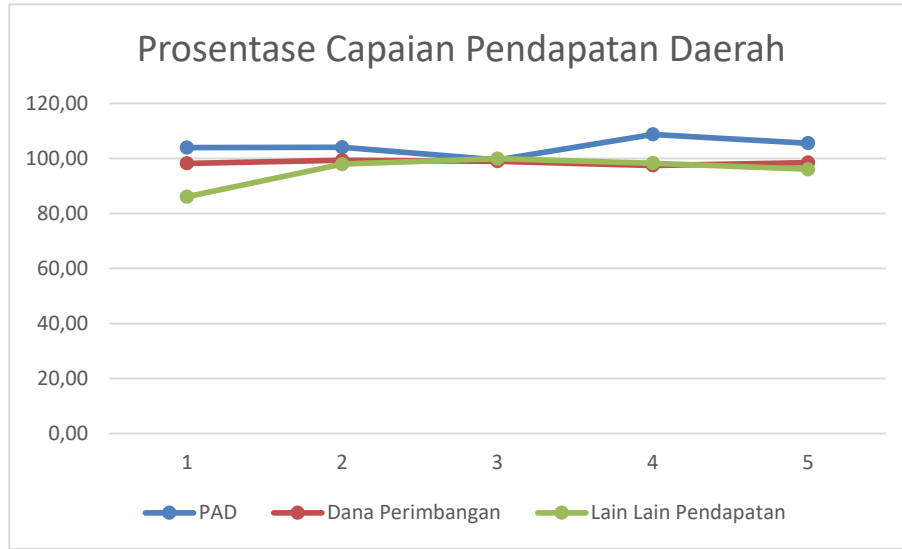


Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 6 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020

Dari data diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 2016-2020, realisasi PADmeningkat dari Rp. 204,7 Milyar pada tahun 2016, menjadi Rp. 254,2 Milyar

pada tahun 2020. Pada kurun waktu yang sama, dana perimbangan meningkat dari Rp. 1.413,4 Triliunn pada tahun 2016, menjadi Rp. 1.629,1 Triliun pada Tahun 2020. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, menurun dari Rp. 754,7 Milyar menjadi Rp. 736,9 Milyar pada tahun 2020. Namun demikian secara prosentasi selama kurun waktu 2016-2020, realisasinya berfluktuasi seperti terlihat pada Gambar Grafik berikut



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

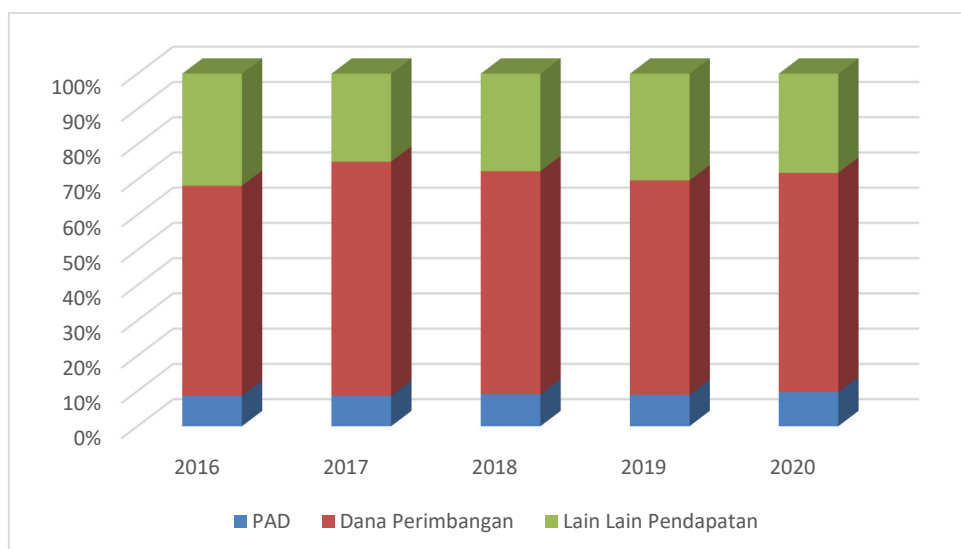
Gambar 2. 7 Prosentase Capaian Pendapatan Daerah

Salah satu ukuran kemandirian Pemerintah Daerah adalah dengan melihat proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Selama Tahun 2016-2020, proporsi PAD cenderung meningkat yaitu pada tahun 2016 sebesar 8,63 % meningkat menjadi 9,70 % pada tahun 2020, dan pada tahun 2019 terjadi penurunan yaitu sebesar 0,15 %. Sangat rendahnya proporsi PAD (masih dibawah 10 %) menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Pusat dan atau proporsi dari sisi finansial masih sangat tinggi. Perkembangan proporsi dapat dilihat pada tabel dan grafik di halaman berikut :

Tabel 2. 14 Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2020

Tahun	PAD		DANA PERIMBANGAN		LAIN LAIN PENDAPATAN	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2016	204.759.434.819,60	8,63	1.413.397.717.898,00	59,57	754.697.060.317,00	31,81
2017	223.076.019.908,56	8,64	1.714.552.477.580,00	66,40	644.537.547.381,00	24,96
2018	234.446.808.098,00	9,11	1.627.548.414.865,00	63,24	711.452.336.829,00	27,64
2019	264.280.368.263,52	8,96	1.793.455.239.304,00	60,77	893.431.644.115,00	30,27
2020	254.192.324.020,16	9,70	1.629.099.969.762,00	62,17	736.940.415.648,00	28,12

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 8 Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Target Belanja Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Tidak Langsung	1.673.041.900.684	1.671.207.552.059	1.661.118.289.365	1.661.118.289.365	1.682.892.328.079
2	Belanja Langsung	974.543.865.138	962.765.507.516	967.198.572.428	967.198.572.428	1.107.270.364.834
	Jumlah Belanja	2.647.585.765.822	2.633.973.059.575	2.628.316.861.793	2.628.316.863.812	2.790.162.694.933

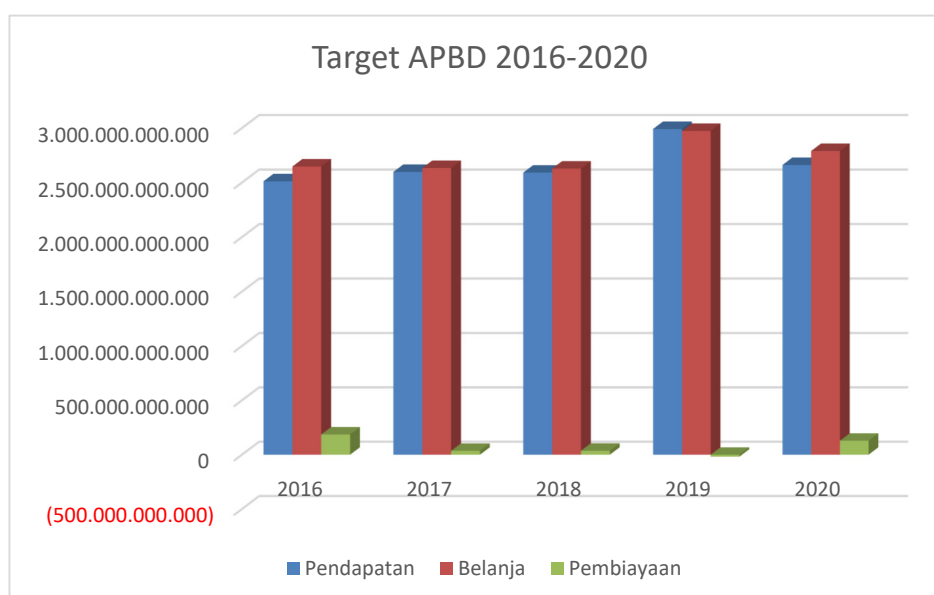
Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Tabel 2. 15 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	Realisasi Belanja Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Tidak Langsung	1.544.894.695.835	1.612.830.209.580	1.687.810.954.975	1.607.782.588.590	1.642.655.476.758
2	Belanja Langsung	915.911.976.113	913.227.254.441	915.104.513.707	1.084.852.424.508	1.023.660.197.308
Jumlah Belanja		2.460.806.671.948	2.526.057.464.021	2.602.915.468.682	2.692.635.015.117	2.666.315.676.086

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

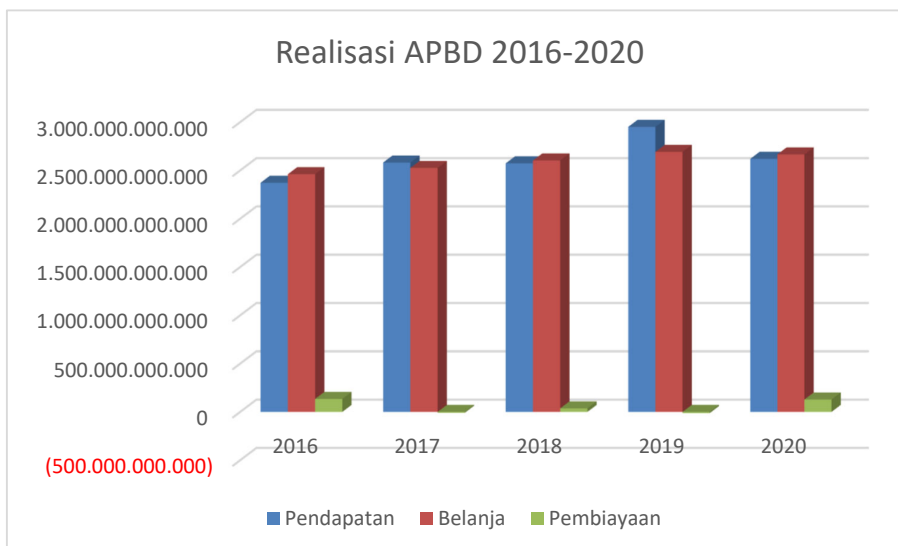


Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
2016	2.512.478.052.246	2.647.585.765.822	186.061.223.614
2017	2.598.280.261.738	2.633.973.059.575	35.692.797.837
2018	2.591.897.874.505	2.628.316.861.793	36.418.987.288
2019	2.992.362.402.748	2.974.005.508.872	(18.356.893.876)
2020	2.661.651.382.865	2.790.162.692.913	128.511.310.048

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 9 Target APBD Tahun 2016 - 2020



Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
2016	2.372.854.213.035	2.460.806.671.948	134.571.214.087
2017	2.582.166.044.870	2.526.057.464.021	(8.797.543.560)
2018	2.573.609.421.909	2.602.915.468.682	36.427.316.888
2019	2.951.167.251.683	2.692.635.013.098	(12.824.825.324)
2020	2.620.232.709.430	2.666.315.674.066	128.839.071.584

Sumber : Data diolah dari LRA Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Gambar 2. 10 Realiasi APBD 2016 – 2020

Pada periode 2016-2020 pendapatan daerah secara total mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,98%. Dalam periode yang sama tercatat hanya di tahun 2018 total pendapatan daerah mencapai realisasi 99,46% atau dengan kata lain tidak mencapai target. Apabila dicermati secara lebih mendalam, diketahui bahwa penurunan capaian target pendapatan secara total di tahun 2020 lebih disebabkan oleh penurunan target pendapatan daerah secara keseluruhan.

Dari dana perimbangan serta adanya perubahan target pendapatan. Hal ini menggambarkan capaian yang baik dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada periode 2016-2020 dari aspek peningkatan pendapatan daerah dimana hal ini tentunya ditunjang oleh kinerja sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki. Namun masih sangat dibutuhkan keseriusan, kerja keras, disiplin dan kepekaan yang lebih terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Kebutuhan yang semakin berkembang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sumberdaya, baik SDM, anggaran, sarana prasarana, standar operasional kerja, diperlukan optimalisasi pengelolaan sumberdaya yang ada.
2. Perkembangan teknologi dan arus informasi bidang pengelolaan keuangan yang menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan untuk lebih partisipatif, transparan, efektif efisien dan akuntabel.
3. Komitmen pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah semakin detail dan terperinci yang mengakibatkan tuntutan untuk semakin akuntabel dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.
5. Pemahaman yang beragam terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh OPD dan mitra kerja Badan Pengelolaan Keuangan.
6. Adanya agenda nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
7. Kurang optimalnya pengelolaan barang milik daerah (manajemen aset) dilingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis yang berakibat pada kualitas dokumen Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis tiap tahunnya.
8. Dinamika perkembangan sosial masyarakat, politik dan ekonomi nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BPKD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Keuangan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan Fungsi BPKD dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat, stakeholder dan lingkungan merupakan bagian dari perencanaan Pengelolaan Keuangan yang tidak boleh diabaikan.

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan kewenangan daerah di bidang Keuangan. Kelancaran dan keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, dukungan stakeholder serta anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan.



Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (Tahun 2014- 2019) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Ciamis sebagai Urusan Penunjang Pemerintahan bidang Keuangan, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ciamis sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1. Opini BPK Terhadap LKPD	Masih adanya kelemahan pengendalian intern	Terdapat SOP yang belum disesuaikan dengan tupoksi OPD
	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi	Pemerintah terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
	Terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan	Kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
	SDM belum memahami	Terbatasnya ketersediaan dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah
	Perubahan aplikasi	SI kurang Optimal
2. Prosentase capaian jumlah bidang tanah milik pemda yang masih belum bersertifikat	Pensertifikatan Aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Ciamis belum optimal terkait dokumen perolehan & bukti kepemilikan	Masih adanya ketidaksesuaian data KIB A (Kartu inventaris Barang Tanah) pada beberapa SKPD
3. Belum optimalnya Peningkatan Pemungutan pajak daerah.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak	Belum optimalnya ekstensifikasi dan intensifikasi Potensi Pajak dan retribusi Daerah
	Pemahaman masyarakat terhadap peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih kurang	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap objek pajak dan retribusi
	Pemungutan Pajak belum optimal	Kurangnya SDM Pemungut Pajak Daerah
	Sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi belum dikelola secara efisien	Belum terintegrasinya aplikasi Pajak, Retribusi dan Penatausahaan Keuangan daerah

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi yang telah disampaikan oleh Bupati Ciamis terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024, adalah :

“Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. Mantapnya Kemandirian Ekonomi, bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.
2. Sejahtera Untuk Semua, bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 misi Bupati dan wakil Bupati antara lain :

- Misi 1 : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia** Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah



sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.

- Misi 2 : **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah** Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.
- Misi 3 : **Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal** Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi-potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah
- Misi 4 : **Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan** Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.
- Misi 5 : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien** Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas
- Misi 6 : **Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa** Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi

RPJMD Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang



berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada urusan Keuangan yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis maka tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**.

Akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan kedua tahun 2020.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat, visi Kementerian Keuangan dalam Rencana strategis kementerian keuangan untuk tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.



2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.



3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;



2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah termasuk dalam Agenda Pembangunan yang Kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasilhasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan melalui pengembangan kerja sama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha.
 - b. Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian.
2. Arah kebijakan meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi:



- a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- b. Pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru.
- c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
 - 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah;
 - 2) Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan halaman | 74 Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.
3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi.
 - b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
4. Arah kebijakan pembangunan wilayah per pulau, dilaksanakan dengan strategi Pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi: pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Adapun telaahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat berdasarkan visi Pembangunan Jangka Menengah



Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 adalah Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin Dengan Inovasi Dan Kolaborasi. Dari visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu: 1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat ibadah Sebagai Pusat Peradaban; 2. Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif; 3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Terkait dengan arah dan kebijakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dalam kurun waktu 2018-2023, diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik dan akuntabel. Selaras dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, maka BPKAD Provinsi Jawa Barat menetapkan 16 tujuan, yaitu:

- a. Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah
- b. Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran
- c. Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal
- d. Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.
- e. Penyelesaian Perda dan Pergub APBD/APBD Perubahan Tepat Waktu
- f. Penyelesaian Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota Tepat Waktu
- g. Penyelesaian Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Tepat Waktu
- h. Prosentase Kinerja Pencairan Anggaran Tinggi



- i. Penyelesaian Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu
- j. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu
- k. Prosentase Pelaksanaan Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- l. Prosentase Penelaahan Kebutuhan Penyampaian Usulan RKBMD
- m. Prosentase Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah

Selain itu program-program BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- b. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- d. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

3.4 Telahan Terhadap RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Ciamis

Seperti halnya Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mempertimbangkan Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. Dalam penyusunannya, Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 telah mempedomani dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata



Ruang Wilayah Nasional Tahun 2007-2027, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, tentunya Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergiskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis yaitu “Mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.”

Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Dasar penyusunan KLHS pada RPJMD sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, rencana dan/atau program. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS juga menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :

1. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah.



2. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan :

1. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
2. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan Validasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis yang harus diatur adalah permasalahan pengelolaan keuangan daerah, berbagai macam bentuk peraturan perundangan tentang keuangan khususnya menyangkut keuangan daerah telah banyak diterbitkan. Namun pada hakikatnya dengan diterbitkannya peraturan perundangan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel baik dari sisi penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang merupakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah. Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pengelolaan keuangan dan aset, maka visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, memperhatikan isu-isu urusan pengelolaan keuangan dan aset. Terdapat beberapa isu penting yang menjadi prioritas, untuk segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ciamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Kabupaten Ciamis melakukan upaya antara lain :

1. Peningkatan tertib administrasi keuangan.
2. Peningkatan penerapan e-money.(non tunai)
3. Peningkatan perencanaan dan pemanfaatan barang daerah.
4. Peningkatan pemungutan pajak daerah



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi - misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, adalah “MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut :

Kemandirian Ekonomi:

Bahwa dalam 5 tahun kedepan perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi mantap, dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi dampak perkembangan perekonomian nasional yang sering tidak menentu. Salah satu solusi untuk meredam dampak tersebut adalah perlunya kemandirian dalam membangun perekonomian daerah. Hal ini mengandung arti bahwa perekonomian dibangun atas dasar kekuatan potensi sumberdaya yang kita miliki yang didayagunakan seoptimal mungkin. Produkproduk unggulan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, selain diupayakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan regional dan nasional, bahkan internasional.

Masyarakat sebagai modal sosial dalam membangun perekonomian, kedepan bukan hanya sekedar penerima manfaat hasil pembangunan ekonomi saja, melainkan juga sebagai pelaku ekonomi melalui aktivitas usahanya. Mereka harus mempunyai kemampuan untuk mengolah sumberdaya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain.

Sejahtera Untuk Semua :

Pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kesejahteraan yang dituju adalah kesejahteraan untuk semua. Hal ini mengandung arti bahwa kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh semua, baik yang kaya maupun miskin, pekerja maupun pengangguran, petani maupun buruh tani, pengusaha maupun pekerja. Semuanya harus terdistribusi secara adil dan merata. Dengan mantapnya kemandirian ekonomi, kondisi yang diharapkan tersebut akan dapat dicapai.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah
- Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal
- Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
- Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
- Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Berdasarkan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019 -2024, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ciamis masuk kedalam Misi yang ke 5, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. yaitu Tata kelola pemerintahan masih belum efektif, diantaranya masih terjadinya tumpang tindih kewenangan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, sehingga perlu dilakukan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien.

Tujuan merupakan penjabaran atau implentasi dari pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD-P Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sehingga rumusan tujuan P-Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD-P Kabupaten Ciamis, sesuai

dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2019-2024 yang menjadi tugas Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tujuan yang dijabarkan ke dalam sasaran pada Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran, yaitu:

- Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD.
- Sasaran 2** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah, dengan indikator sasaran Hasil Evaluasi AKIP BPKD.
- Sasaran 3** : Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran Level Maturitas SPIP BPKD.
- Sasaran 4** : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah, dengan indikator sasaran Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD.
- Sasaran 5** : Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan indikator sasaran Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat

waktu.

Sasaran 6 : Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah, dengan indikator sasaran Persentase Aset Daerah Yang Terkelola.

Sasaran 7 : Meningkatnya Kemandirian Anggaran, dengan indikator sasaran Persentase Kemandirian Keuangan Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran*	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja						
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Akhir	
-1	-2	-3	-4	5	-6						
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	A. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	a.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	B. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	b.1 Level Maturitas SPIP BPKD	Level	2	3	3	3	3	3	3	3
	C. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	c.1 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	D. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	d.1 Hasil Evaluasi AKIP BPKD	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A
			1.3 Opini BPK (TPB16)	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Tujuan	Sasaran*	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Akhir
-1	-2	-3	-4	5	-6					
	E Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	e.1 Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		e.2 Ketepatan waktu penetapan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	F Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	f.1 Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	G Meningkatnya Kemandirian Anggaran	g.1 Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	5	5	5	5	5	5	5



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, maka dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis selama 5 tahun kedepan.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai perangkat daerah yang bertugas mengelola keuangan daerah dalam lingkup kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah Pengelola Keuangan Daerah dalam lingkup kabupaten, tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya serta pembinaan teknis penyelenggaraan

fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya. Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang Keuangan yang dikaitkan dengan kebiakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam tabel 5.1 dalam Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua				
MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Mengoptimalkan sistem Pelayanan Publik	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		3. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan anggaran BPKD.	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan anggaran BPKD.



VISI : Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua				
MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah		
		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja BPKD	1. Optimalisasi penyusunan pengelolaan dan pelaporan keuangan Perangkat daerah
		5. Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Optimalisasi Kualitas Penganggaran dan Pelaporan keuangan Daerah melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan SKPD 2. Mengoptimalkan penatausahaan pengelolaan keuangan perangkat daerah
		6. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	Optimalisasi Aset Daerah melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
		7. Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Optimalisasi PAD melalui Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1. Mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah.

Sumber : Data diolah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta disesuaikan dengan kebijakan pusat yaitu Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dirumuskan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah
3. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah
5. Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah
7. Meningkatnya Kemandirian Anggaran

Selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis untuk periode selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 berikut ini.



Tabel 6. 1 Tabel Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD		81,25	88,31	19.081.519.025	88,75	19.586.614.600	89	19.586.614.600	89,25	20.585.818.000	90,25	21.615.108.900	90,25			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	100	100	1.225.581.320		1.290.085.600		1.290.085.600		1.354.588.000		1.422.317.000				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12	12	1.225.581.320		1.290.085.600		1.290.085.600		1.354.588.000		1.422.317.000				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah fasilitas Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	92.900.500	12 Bulan	97.790.000	12 Bulan	97.790.000	2 Paket	102.679.000	2 Paket	107.813.000	2 Paket		Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 peralatan	10 peralatan	211.584.950	10 peralatan	222.721.000	10 peralatan	222.721.000	1 Paket	233.857.000	1 Paket	245.549.000	1 Paket		Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	142.495.250	12 Bulan	149.995.000	12 Bulan	149.995.000	1 Paket	157.494.000	1 Paket	165.369.000	1 Paket		Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis	369.150.620	3 jenis	388.579.600	3 jenis	388.579.600	1 Paket	408.008.000	1 Paket	428.409.000	1 Paket		Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	29.450.000	12 Bulan	31.000.000	12 Bulan	31.000.000	12 Bulan	32.550.000	12 Bulan	34.177.000	12 Bulan		Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	420.000.000	12 Bulan	441.000.000	12 Bulan		Sekretariat	BPKD Ciamis
			Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100													
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.912.670.455		3.065.968.900		3.065.968.900		3.219.267.000		3.380.230.700				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	963.764.455	12 bulan	1.014.488.900	12 bulan	1.014.488.900	12 bulan	1.065.213.000	12 bulan	1.118.474.000	12 bulan		Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	1.948.906.000	12 bulan	2.051.480.000	12 bulan	2.051.480.000	12 bulan	2.154.054.000	12 bulan	2.261.756.700	12 bulan		Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	-	-	12.011.798.100		12.144.803.100		12.144.803.100		979.131.050		986.000.000				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.248.652.500	1 Kegiatan	1.320.980.000	1 Kegiatan	1.320.980.000	1 Kegiatan	1.320.980.000	1 Unit	25.980.000	1 Unit	26.000.000	1 Unit	Sekretariat
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang representatif	1 paket	1 paket	10.031.502.500	1 paket	10.052.180.000	1 paket	10.052.180.000	2 Unit	296.861.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit		Sekretariat	BPKD Ciamis		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	74.039.800	1 Kegiatan	94.039.800	1 Kegiatan	94.039.800	61 Unit	127.414.800	61 Unit	130.000.000	61 Unit		Sekretariat	BPKD Ciamis		



Tujua n	Sasara n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g- Jawab	Lokasi	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada Akhir
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	657.603.300	1 Kegiatan	677.603.300	1 Kegiatan	677.603.300	20 Unit	528.875.250	20 Unit	530.000.000	20 Unit	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.931.469.150	12 Bulan	3.085.757.000	12 Bulan	3.085.757.000	12 Bulan	3.127.460.000		3.190.000.000	12 Bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpeliharanya	12 bulan	12 bulan	570.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	600.000.000	131 Unit	638.000.000	12 bulan	650.000.000	12 bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional yang Terfasilitasi	1 paket	1 paket	57.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	86 Unit	60.000.000	1 paket	65.000.000	1 paket	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	1.156.720.000	12 bulan	1.217.600.000	12 bulan	1.217.600.000	191 Unit	1.212.380.000	12 bulan	1.250.000.000	12 bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	12 bulan	12 bulan	75.997.150	12 bulan	79.997.000	12 bulan	79.997.000	0 Unit	261.570.000	12 bulan	265.000.000	12 bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	1 paket	1 paket	1.071.752.000	1 paket	1.128.160.000	1 paket	1.128.160.000	63 Unit	955.510.000	1 paket	960.000.000	1 paket	Sekretariat	BPKD Ciamis
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD		Predikat BB	Predikat BB	1.159.503.500	Predikat BB	1.220.530.000	Predikat BB	1.220.530.000	Predikat BB	1.352.583.000	Predikat A	1.420.212.150	Predikat A		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			149.245.000		157.100.000		157.100.000		164.955.000		173.202.750			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	6.745.000	1 Dokumen	7.100.000	1 Dokumen	7.100.000	1 Dokumen	7.455.000	1 Dokumen	7.827.750	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yng melaksanakan Penilaian Laporan Pengelolaan Keuangan	56 SKPD	56 SKPD	142.500.000	56 SKPD	150.000.000	56 SKPD	150.000.000	1 Laporan	157.500.000	1 Laporan	165.375.000	1 Laporan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	-	-	1.010.258.500		1.063.430.000		1.063.430.000		1.116.601.000		1.172.431.000			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	175 Pakaian	175 Pakaian	117.258.500	175 Pakaian	123.430.000	175 Pakaian	123.430.000	1 Paket	129.601.000	1 Paket	136.081.000	1 Paket	Sekretariat	BPKD Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	285.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	20 Orang	315.000.000	20 Orang	330.750.000	20 Orang	Sekretariat	BPKD Ciamis		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	513.000.000	1 Kegiatan	540.000.000	1 Kegiatan	540.000.000	1 Kegiatan	567.000.000	1 Kegiatan	595.350.000	1 Kegiatan	Sekretariat	BPKD Ciamis	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	95.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	20 Orang	105.000.000	20 Orang	110.250.000	20 Orang	Sekretariat	BPKD Ciamis	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKD	Nilai 3	Nilai 2	1.010.258.500	Nilai 3	1.063.430.000	Nilai 3	1.063.430.000	Nilai 3	1.179.773.000	Nilai 3	1.238.761.650	Nilai 3			
			Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	100%	100%	612.571.875	100%	644.812.500	100%	644.812.500	100%	677.053.000	100%	711.392.500	100%			
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			612.571.875		629.812.500		629.812.500		677.053.000		711.392.500				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	593.571.875	1 Dokumen	624.812.500	1 Dokumen	624.812.500	1 Dokumen	656.053.000	1 Dokumen	688.855.000	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.250.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.250.000	1 Dokumen	5.512.500	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.250.000	1 Dokumen	5.512.500	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.250.000	1 Dokumen	5.512.500	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
			Kualitas Pelaporan Keuangan		760	765	81.713.693.084	770	86.014.413.773	775	90.527.176.603	780	95.066.081.433	785	99.818.385.505	790		
			Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan			81.713.693.084		86.014.413.773		90.527.176.603		95.066.081.433		99.818.385.505				
			Jumlah pelaksana penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	81.455.369.084	12 bulan	85.742.493.773	12 bulan	90.255.256.603	357 Orang/bulan	32.637.359.147	357 Orang/bulan	33.000.000.000	357 Orang/bulan			
Jumlah pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	210.824.000	12 bulan	221.920.000	12 bulan	221.920.000	12 Dokumen	233.016.000	12 Dokumen	244.666.800	12 Dokumen	12 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis			
Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	12 bulan	21.375.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	22.500.000	12 Dokumen	23.625.000	12 Dokumen	24.806.250	12 Dokumen	12 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis			
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.870.000	1 Dokumen	14.600.000	1 Dokumen	14.600.000	1 Dokumen	15.330.000	1 Dokumen	16.096.500	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis			
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	12.255.000	3 Dokumen	12.900.000	3 Dokumen	12.900.000	1 Laporan	13.545.000	1 Laporan	14.222.250	1 Laporan	1 Laporan	Sekretariat	BPKD Ciamis			



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada Akhir
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				102.567.287.484	107.466.370.873	111.979.133.703	117.714.275.433	123.599.989.205					Sekretariat	BPKD Ciamis	
	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kelengkapan Pelaporan keuangan		612.571.875	644.812.500	644.812.500	709.793.000	745.282.650					Sekretariat	BPKD Ciamis		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	593.571.875	1 Dokumen	624.812.500	1 Dokumen	624.812.500	1 Dokumen	687.293.000	1 Dokumen	721.657.650	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.300.000	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.775.000	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.775.000	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.775.000	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				149.245.000		157.100.000		157.100.000		172.810.000		181.450.500			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	6.745.000	1 Dokumen	7.100.000	1 Dokumen	7.100.000	1 Dokumen	7.810.000	1 Dokumen	8.200.500	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yng melaksanakan Penilaian Laporan Pengelolaan Keuangan	56 SKPD	56 SKPD	142.500.000	56 SKPD	150.000.000	56 SKPD	150.000.000	56 SKPD	165.000.000	56 SKPD	173.250.000	56 SKPD	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Kelengkapan Pelaporan keuangan	-	-	81.713.693.084		86.014.413.773		90.527.176.603		95.066.081.433		99.819.385.505			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelaksana penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	81.455.369.084	12 bulan	85.742.493.773	12 bulan	90.255.256.603	12 bulan	94.768.019.433	12 bulan	99.506.420.405			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	210.824.000	12 bulan	221.920.000	12 bulan	221.920.000	12 bulan	244.122.000	12 bulan	256.328.100	12 bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	12 bulan	21.375.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	24.750.000	12 bulan	25.987.500	12 bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis



Tujua n	Sasara n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada Akhir
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.870.000	1 Dokumen	14.600.000	1 Dokumen	14.600.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.750.000	1 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	12.255.000	3 Dokumen	12.900.000	3 Dokumen	12.900.000	3 Dokumen	14.190.000	3 Dokumen	14.899.500	3 Dokumen	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	-	-	1.010.258.500		1.063.430.000		1.063.430.000		1.179.773.000		1.238.761.650			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	175 Pakaian	175 Pakaian	117.258.500	175 Pakaian	123.430.000	175 Pakaian	123.430.000	175 Pakaian	145.773.000	175 Pakaian	153.061.650	175 Pakaian	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	285.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	330.000.000	1 Kegiatan	346.500.000	1 Kegiatan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi nya Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	513.000.000	1 Kegiatan	540.000.000	1 Kegiatan	540.000.000	1 Kegiatan	594.000.000	1 Kegiatan	623.700.000	1 Kegiatan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	95.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	115.500.000	1 Kegiatan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	-	-	1.225.581.320		1.290.085.600		1.290.085.600		1.417.437.000		1.488.308.850			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah fasilitas Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	92.900.500	12 Bulan	97.790.000	12 Bulan	97.790.000	12 Bulan	107.000.000	12 Bulan	112.350.000	12 Bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 peralatan	10 peralatan	211.584.950	10 peralatan	222.721.000	10 peralatan	222.721.000	10 peralatan	244.000.000	10 peralatan	256.200.000	10 peralatan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	142.495.250	12 Bulan	149.995.000	12 Bulan	149.995.000	12 Bulan	164.900.000	12 Bulan	173.145.000	12 Bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis	369.150.620	3 jenis	388.579.600	3 jenis	388.579.600	3 jenis	427.437.000	3 jenis	448.808.850	3 jenis	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	29.450.000	12 Bulan	31.000.000	12 Bulan	31.000.000	12 Bulan	34.100.000	12 Bulan	35.805.000	12 Bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	440.000.000	12 Bulan	462.000.000	12 Bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	-	-	12.011.798.100		12.144.803.100		12.144.803.100		12.401.521.000		13.021.597.050			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.248.652.500	1 Kegiatan	1.320.980.000	1 Kegiatan	1.320.980.000	1 Kegiatan	1.453.078.000	1 Kegiatan	1.525.731.900	1 Kegiatan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang representatif	1 paket	1 paket	10.031.502.500	1 paket	10.052.180.000	1 paket	10.052.180.000	1 paket	10.100.000.000	1 paket	10.605.000.000	1 paket	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	74.039.800	1 Kegiatan	94.039.800	1 Kegiatan	94.039.800	1 Kegiatan	103.443.000	1 Kegiatan	108.615.150	1 Kegiatan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	657.603.300	1 Kegiatan	677.603.300	1 Kegiatan	677.603.300	1 Kegiatan	745.000.000	1 Kegiatan	782.250.000	1 Kegiatan	Sekretariat	BPKD Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g- Jawab	Lokasi
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	-	-	2.912.670.455		3.065.968.900		3.065.968.900		3.372.528.000		3.541.154.400			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	963.764.455	12 bulan	1.014.488.900	12 bulan	1.014.488.900	12 bulan	1.115.900.000	12 bulan	1.171.695.000	12 bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	1.948.906.000	12 bulan	2.051.480.000	12 bulan	2.051.480.000	12 bulan	2.256.628.000	12 bulan	2.369.459.400	12 bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	-	-	2.931.469.150		3.085.757.000		3.085.757.000		3.394.332.000		3.564.048.600			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpeliharanya	12 bulan	12 bulan	570.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	660.000.000	12 bulan	693.000.000	12 bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional yang Terfasilitasi	1 paket	1 paket	57.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	66.000.000	1 paket	69.300.000	1 paket	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	1.156.720.000	12 bulan	1.217.600.000	12 bulan	1.217.600.000	12 bulan	1.339.360.000	12 bulan	1.406.328.000	12 bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	12 bulan	12 bulan	75.997.150	12 bulan	79.997.000	12 bulan	79.997.000	12 bulan	87.996.000	12 bulan	92.395.800	12 bulan	Sekretariat	BPKD Ciamis
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	1 paket	1 paket	1.071.752.000	1 paket	1.128.160.000	1 paket	1.128.160.000	1 paket	1.240.976.000	1 paket	1.303.024.800	1 paket	Sekretariat	BPKD Ciamis
Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	% Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan	100%	100%	3.995.816.470	100%	4.206.122.600	100%	4.256.122.600	100%	4.586.296.000	100%	4.815.610.800	100%	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	% Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Dengan Standar Biaya yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	1.374.222.500	100%	1.446.550.000	100%	1.496.550.000	100%	1.530.245.000	100%	1.633.524.550	100%	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun dan diverifikasi	4 dokumen	4 dokumen	392.872.500	4 dokumen	413.550.000	4 dokumen	413.550.000	4 dokumen	445.595.000	4 dokumen	445.595.000	4 dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	380.000.000	2 dokumen	400.000.000	2 dokumen	400.000.000	2 dokumen	420.000.000	2 dokumen	420.000.000	2 dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun dan ditetapkan	5 dokumen	5 dokumen	380.000.000	5 dokumen	400.000.000	5 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	420.000.000	5 Dokumen	420.000.000	5 Dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Tentang Teknis Penyusunan anggaran pembiayaan SKPD yang disusun dan ditetapkan	3 dokumen	3 dokumen	95.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	105.000.000	3 Dokumen	208.279.550	3 Dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis



Tujua n	Sasara n	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-g- Jawab	Lokasi
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Kordinasi Perencaan Anggaran Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD	1 dokumen	1 dokumen	126.350.000	1 dokumen	133.000.000	1 Dokumen	183.000.000	1 Dokumen	139.650.000	1 Dokumen	139.650.000	1 Dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	% Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dikelola dengan baik	100%	100%	348.650.000	100%	367.000.000	100%	367.000.000	100%	535.350.000	100%	535.350.000	100%	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen							1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen		
		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan							1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan		
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen							1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen		
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen							1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen		
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dana Perimbagnan dan Dana Transfer Lainnya yang Terkelola Dengan Baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	348.650.000	1 Kegiatan	367.000.000	1 Kegiatan	367.000.000	1 Kegiatan	385.350.000	1 Kegiatan	385.350.000	1 Kegiatan	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen							1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan							1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan		



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada Akhir
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen							1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen		
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen							1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen		
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen							1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen		
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	97 Orang							97 Orang	15.000.000	97 Orang	15.000.000	97 Orang		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	% SKPD yang Menyusun LKPD Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	100%	2.272.943.970	100%	2.392.572.600	100%	2.392.572.600	100%	2.520.701.000	100%	2.646.736.250	100%	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD Mengenai Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 dokumen	1 dokumen	65.645.000	1 dokumen	69.100.000	1 dokumen	69.100.000	1 dokumen	72.555.000	1 dokumen	76.182.750	1 dokumen	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban yang direkonsiliasi dan diverifikasi	55 SKPD	55 SKPD	109.250.000	55 SKPD	115.000.000	55 SKPD	115.000.000	55 SKPD	124.250.000	55 SKPD	130.462.500	55 SKPD	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang Disusun dan Dikoordinasikan	1 dokumen	1 dokumen	1.148.048.970	1 dokumen	1.208.472.600	1 dokumen	1.208.472.600	1 dokumen	1.268.896.000	1 dokumen	1.332.341.000	1 dokumen	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun dan dikordinasikan	55 SKPD	55 SKPD	285.000.000	55 SKPD	300.000.000	55 SKPD	300.000.000	55 SKPD	315.000.000	55 SKPD	330.750.000	55 SKPD	Bidang Aklap	Kab. Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- Jawab	Lokasi
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang disusun dan dikoordinasikan	2 dokumen	2 dokumen	190.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	210.000.000	2 dokumen	220.500.000	2 dokumen	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun dan dikoordinasikan	55 SKPD	55 SKPD	47.500.000	55 SKPD	50.000.000	55 SKPD	50.000.000	55 SKPD	57.500.000	55 SKPD	60.375.000	55 SKPD	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	55 SKPD	55 SKPD	427.500.000	55 SKPD	450.000.000	55 SKPD	450.000.000	55 SKPD	472.500.000	55 SKPD	496.125.000	55 SKPD	Bidang Aklap	Kab. Ciamis
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah															
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan															
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Bagi Hasil Bagi Kabupaten/Kota	1 kegiatan													
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% SKPD yang Menyusun LKPD Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan													
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	% SKPD yang Menyusun LKPD Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen													
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen													
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	55 Orang													



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada Akhir
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	%SKPD yang Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	7.178.244.270	100%	7.556.046.600	100%	8.156.046.600	100%	8.971.650.800	100%	9.420.233.340	100%	BPKD	Kab. Ciamis	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang Dikelola Dengan Baik	100%	100%	7.178.244.270	100%	7.556.046.600	100%	8.156.046.600	100%	8.971.650.800	100%	9.420.233.340	100%	BPKD	Kab. Ciamis
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	570.000.000	1 dokumen	600.000.000	1 dokumen	600.000.000	1 dokumen	630.000.000	1 dokumen	661.500.000	1 dokumen	Bidang Anggaran	Kab. Ciamis
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	4.185.232.600	1 dokumen	4.405.508.000	1 dokumen	4.405.508.000	1 dokumen	5.033.587.300	1 dokumen	5.285.266.330	1 dokumen	BPKD	Kab. Ciamis
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	232.113.500	1 laporan	244.330.000	1 laporan	244.330.000	1 laporan	256.546.500	1 laporan	269.373.000	1 laporan	BPKD	Kab. Ciamis
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100 sertifikat	100 sertifikat	1.179.615.000	100 sertifikat	1.241.700.000	100 sertifikat	1.241.700.000	100 sertifikat	1.303.785.000	100 sertifikat	1.368.974.250	100 sertifikat	BPKD	Kab. Ciamis
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	332.585.500	1 dokumen	350.090.000	1 dokumen	350.090.000	1 dokumen	367.594.000	1 dokumen	385.974.225	1 dokumen	BPKD	Kab. Ciamis
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	300.722.595	1 dokumen	316.550.100	1 dokumen	316.550.100	1 dokumen	332.377.000	1 dokumen	348.996.485	1 dokumen	BPKD	Kab. Ciamis
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	947.975.075	1 dokumen	997.868.500	1 dokumen	997.868.500	1 dokumen	1.047.761.000	1 dokumen	1.100.149.050	1 dokumen	BPKD	Kab. Ciamis
		Meningkatnya Kemandirian Anggaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	%Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%	5%	6.932.203.580	5%	7.297.056.400	5%	12.258.652.400	5%	13.332.878.900	5%	13.999.522.845	5%	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang Diterima			100%	100%	6.932.203.580	100%	7.297.056.400	100%	12.258.652.400	100%	13.332.878.900	100%	13.999.522.845	100%	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			1 Laporan	1 Laporan	142.500.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	338.275.500	1 laporan	338.275.500	1 laporan	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang Disediakan			12 bulan	12 bulan	465.500.000	12 bulan	490.000.000	12 bulan	980.000.000	12 bulan	1.000.000.000	12 bulan	1.100.000.000	12 bulan	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang didata dan didaftarkan			1 laporan	1 laporan	855.000.000	1 laporan	900.000.000	1 laporan	2.200.000.000	1 laporan	2.200.000.000	1 laporan	2.200.000.000	1 laporan	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen laporan Basis data pajak daerah			1 laporan	1 laporan	912.000.000	1 laporan	960.000.000	1 laporan	1.920.000.000	1 laporan	1.920.000.000	1 laporan	1.920.000.000	1 laporan	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			1 laporan	1 laporan	487.800.300	1 laporan	513.474.000	1 laporan	1.026.948.000	1 laporan	1.250.000.000	1 laporan	1.250.000.000	1 laporan	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis



Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada Akhir
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	583.795.900	1 laporan	614.522.000	1 laporan	1.229.044.000	1 laporan	1.229.044.000	1 laporan	1.229.044.000	1 laporan	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan Jumlah Wajib Pajak yang Difasilitasi Konsultasi	1 SOP	1 SOP	171.000.000	1 SOP	180.000.000	1 SOP	360.000.000	1 SOP	360.000.000	1 SOP	460.000.000	1 SOP	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pajak Daerah yang Diverifikasi	1 laporan	1 laporan	430.920.000	1 laporan	453.600.000	1 laporan	907.200.000	1 laporan	907.200.000	1 laporan	907.200.000	1 laporan	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Kajian Pajak Daerah yang Dikembangkan dan Dianalisis	1 dokumen	1 dokumen	216.941.430	1 dokumen	228.359.400	1 dokumen	228.359.400	1 dokumen	228.359.400	1 dokumen	395.003.345	1 dokumen	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang Disebarluaskan	1 dokumen	1 dokumen	860.723.750	1 dokumen	906.025.000	1 dokumen	1.206.025.000	1 dokumen	1.250.000.000	1 dokumen	1.250.000.000	1 dokumen	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang Ditagih	1 laporan	1 laporan	550.810.000	1 laporan	579.800.000	1 laporan	579.800.000	1 laporan	750.000.000	1 laporan	750.000.000	1 laporan	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	47.500.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	986.869.500	1 dokumen	1.038.810.000	1 dokumen	1.038.810.000	1 dokumen	1.500.000.000	1 dokumen	1.600.000.000	1 dokumen	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	220.842.700	1 dokumen	232.466.000	1 dokumen	232.466.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	Bidang Pelayanan dan Bidang Penagihan	Kab. Ciamis



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ciamis

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	10,40	12,00	15,00	19,00	22,00	25,00	25,00
2	Rasio PAD	Persen	11,17	9,70	12,70	15,70	18,70	21,70	21,70
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer <i>Expenditures</i>)	Persen	4,00	2,95	25,06	22,99	22,34	21,70	21,70
4	Opini Laporan Keuangan (TPB16)	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	10	6	8,6	11,2	13,8	16,4	16,4
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	9	16	18	20	22	24	24
7	Managemen Aset		4	4	4	4	4	4	4
8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	11	4	3,5	3	2,5	2	2



Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP BPKD.	BB	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP BPKD	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
		Keuangan Daerah	yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu						
			Ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	5%	5%	5%	5%	5%	5%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan dalam kerangka mewujudkan Visi Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Ciamis.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Ciamis.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Keuangan dan atau target kinerja sasaran Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis. Laporan (LKJIP) itu akan menjadi bukti (*Prove*) pencapaian kinerja



dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis di masa yang akan datang.

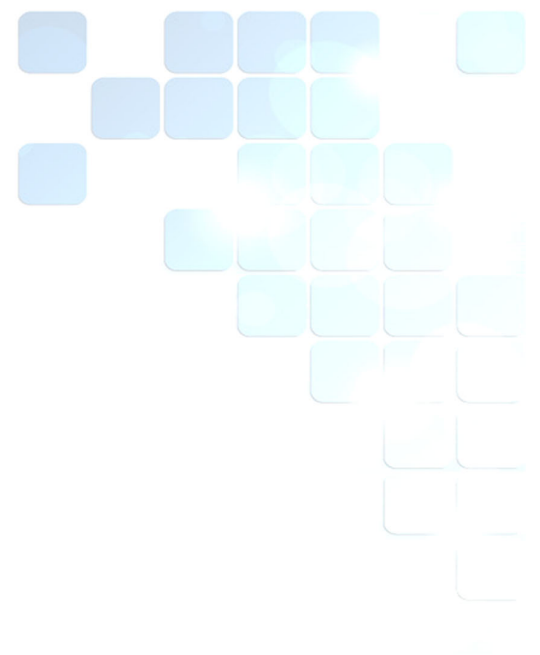
Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Rentra Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis ini.

Ciamis, 21 Maret 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



ASEP DEDI HERDIANA.,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650912 199301 1 003



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
BPKD
2019 - 2024**

